

## **Analisis Implementasi Kebijakan Perhutanan Sosial di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Lampung, dan Nusa Tenggara Barat Menggunakan Pendekatan *Systematic Literature Review***

Oleh

I Gusti Ayu Putri Husadi<sup>1)</sup> dan Dwiko Budi Permadi<sup>2)</sup>

### **INTISARI**

Perhutanan Sosial (PS) adalah kebijakan strategis yang memberikan hak kelola hutan kepada masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan, menjaga kelestarian lingkungan, dan mengurangi ketimpangan akses terhadap sumber daya hutan. Namun, implementasinya di berbagai wilayah masih menunjukkan hasil yang beragam serta menghadapi tantangan, terutama dalam aspek kelembagaan, regulasi, dan partisipasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) untuk mengevaluasi pelaksanaan PS di Provinsi D.I. Yogyakarta, Lampung, dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Studi ini mengkaji tren penelitian, tantangan, dan gap implementasi berdasarkan literatur ilmiah yang terbit antara tahun 2007 hingga 2024, sebagai dasar penyusunan kebijakan yang lebih adaptif dan berkelanjutan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa Yogyakarta relatif berhasil dalam pelaksanaan PS, didukung kelembagaan lokal yang kuat, ekowisata yang berkembang, dan kontribusi terhadap PAD. Lampung menghadapi hambatan dalam bentuk ketidaksinkronan regulasi, lemahnya pendampingan pasca-izin, serta ketimpangan internal kelompok. Di NTB, kelembagaan lemah, rendahnya legalisasi, serta dominasi tengkulak menjadi persoalan utama. Ketimpangan akses, minimnya peran perempuan dalam kelembagaan, dan keterbatasan lahan juga menjadi tantangan umum di ketiga wilayah.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan PS sangat bergantung pada kestabilan regulasi, penguatan kelembagaan, diversifikasi usaha, dan integrasi dengan sektor ekonomi lokal. Temuan ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan PS yang lebih inklusif, kontekstual, dan berkelanjutan, serta mendorong studi lanjutan terkait aspek ekologi, kelompok rentan, dan model bisnis hutan kemasyarakatan.

**Kata kunci:** perhutanan sosial, *systematic literature review*, kebijakan perhutanan sosial, implementasi perhutanan sosial.

---

<sup>1)</sup> Mahasiswa Departemen Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan, UGM

<sup>2)</sup> Staf pengajar Departemen Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan, UGM

## **Policy Implementation Analysis of Social Forestry in the Provinces of the Special Region of Yogyakarta, Lampung, and West Nusa Tenggara: A Systematic Literature Review Approach**

By

I Gusti Ayu Putri Husadi<sup>1)</sup> and Dwiko Budi Permadi<sup>2)</sup>

### **ABSTRACT**

Social Forestry (SF) is a strategic policy that grants communities the rights to manage forests with the objectives of improving welfare, preserving environmental sustainability, and reducing disparities in access to forest resources. However, its implementation across various regions has yielded mixed results and continues to face significant challenges, particularly in the areas of institutional capacity, regulatory frameworks, and community participation. This study employs a Systematic Literature Review (SLR) approach to evaluate the implementation of SF in the provinces of D.I. Yogyakarta, Lampung, and West Nusa Tenggara (NTB). The study examines research trends, challenges, and implementation gaps based on scientific literature published between 2007 and 2024, providing a foundation for the development of more adaptive and sustainable policies.

The analysis indicates that Yogyakarta has achieved relative success in implementing SF, supported by strong local institutions, the growth of ecotourism, and contributions to local government revenue. Lampung faces obstacles such as regulatory inconsistencies, insufficient post-permit facilitation, and internal group disparities. In NTB, weak institutional structures, low rates of legalization, and the dominance of intermediaries are the main issues. Common challenges across all three regions include unequal access, limited participation of women in institutions, and land constraints.

This study concludes that the success of SF is highly dependent on regulatory stability, institutional strengthening, business diversification, and integration with local economic sectors. These findings are expected to inform the development of more inclusive, context-specific, and sustainable SF policies, as well as encourage further research on ecological aspects, vulnerable groups, and community-based forest business models

**Keywords:** social forestry, systematic literature review, social forestry policy, social forestry implementation.

---

<sup>1)</sup> Student of the Forest Management Department, Faculty of Forestry, UGM

<sup>2)</sup> Lecturer of the Forest Management Department, Faculty of Forestry, UGM